

Pandangan Tenaga Pendidik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Yosef Triyoga Saputra¹, Yoannes Bosco Teduh¹, Tegar Bagus Ananto¹, Valentinus Renotri¹, Rayhan Abisakti¹

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
221007848@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Saputra, Y. T., Teduh, Y. B., Ananto, T. B., Renotri, V., Abisakti, R. (2026).
Pandangan Tenaga Pendidik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, Vol. 12(1), 55-68.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan mengatasi gizi buruk dan *stunting* pada anak-anak Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini mengkaji pandangan tenaga pendidik terhadap implementasi MBG melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber dari berbagai sekolah. Temuan menunjukkan dukungan terhadap tujuan program, namun mengidentifikasi permasalahan serius seperti inkonsistensi kualitas menu, lemahnya pengawasan vendor, risiko keracunan, dan ketidaktepatan sasaran. Analisis sosiologi politik mengungkap ketegangan distribusi kekuasaan antara pemerintah, vendor, dan sekolah yang memicu konflik kepentingan. Para narasumber sepakat program perlu dievaluasi, bukan dihentikan, dengan memperbaiki seleksi penerima manfaat dan memperketat pengawasan. Beberapa narasumber lebih memprioritaskan pemerataan fasilitas pendidikan sebagai alternatif berdampak jangka panjang.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis; Sosiologi Politik; Tenaga Pendidik.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) aims to address malnutrition and stunting among Indonesian children while improving educational quality. This study examines educators' perspectives on MBG implementation through in-depth interviews with nine informants from various schools. Findings indicate general support for the program's objectives, yet reveal serious concerns including inconsistent food quality, weak vendor oversight, food poisoning risks, and poorly targeted beneficiaries. A political sociology analysis uncovers power distribution tensions among the government, vendors, and schools that generate competing interests. Informants agreed the



program requires thorough evaluation rather than termination, with improved beneficiary selection and stricter supervision. Some informants prioritized equitable educational facilities as a more sustainable long-term alternative.

Keywords: Educators; Free Nutritious Meal Program; Political Sociology.

PENDAHULUAN

Program makan bergizi gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makan bergizi secara gratis kepada siswa di sekolah. Dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting*, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan akses makanan sehat. Melalui MBG, pemerintah ingin memastikan bahwa siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai, yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki status gizi anak-anak di Indonesia, yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar mereka.

Namun, meskipun tujuan dari program ini sangat mulia, implementasinya di lapangan sering kali menimbulkan kontroversi. Di beberapa daerah, kualitas makanan yang disalurkan tidak selalu memenuhi standar kesehatan yang seharusnya, bahkan dalam beberapa kasus, terjadi keracunan makanan yang membuat pihak sekolah dan orang tua khawatir. Selain itu, masalah administrasi dan pengelolaan vendor juga menjadi sorotan. Beberapa vendor mengeluhkan tidak mendapatkan pembayaran atau *reimburse* yang layak untuk makanan yang mereka sediakan, yang tentunya memengaruhi kualitas pelayanan yang mereka berikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, apakah program ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan atau hanya menjadi sebuah janji politik yang tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan tenaga pendidik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Guru-guru merupakan pihak yang paling dekat dengan siswa, sehingga mereka memiliki perspektif yang sangat penting mengenai dampak dari program ini terhadap anak-anak. Sebagai tenaga pendidik, mereka tidak hanya terlibat dalam proses pembelajaran tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, pandangan mereka tentang bagaimana program ini dijalankan dan apakah mereka merasa

manfaatnya dirasakan oleh siswa menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana tenaga pendidik menilai program MBG, apakah mereka merasa program ini efektif, ataukah ada kendala-kendala tertentu yang harus diperbaiki dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi program MBG, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan ke depannya. Mengingat tantangan-tantangan yang ada, seperti kualitas makanan yang tidak selalu terjamin, pengawasan yang kurang, hingga permasalahan administratif dengan vendor, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengar masukan dari pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program ini. Dengan melihat perspektif tenaga pendidik, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh siswa, tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar memberi dampak positif terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia.

METODE

Tabel 1. Data Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan Utama/ Jabatan	Lokasi Wawancara
1.	Pak Farhan	Pria	32	S1	Wakil Kepala Sekolah SDN Condong Catur	SDN Condong Catur
2.	Pak Vincent	Pria	60	S1	Kepala Sekolah SMPN 6 Simpang Hulu	Daring
3.	Bu Lastri	Wanita	47	S1	Guru SDN Perumnas	Rumah Narasumber
4.	Pak Aris	Pria	55	S2	Widyaiswara Muda BBPPMP V	Rumah Narasumber

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan Utama/ Jabatan	Lokasi Wawancara
5.	Mas Aji	Pria	30	S1	Guru SMP Eksperimen Mangunan	Ngetno Cafe
6.	Mas Carol	Pria	34	S1	Kepala Sekolah SMP Eksperimen Mangunan	Ngetno Cafe
7.	Mbak Tata	Wanita	28	S1	Guru SD Eksperimen Mangunan	Ngetno Cafe
8.	Mbak Hana	Wanita	26	S1	Guru TK Eksperimen Mangunan	Ngetno Cafe
9.	Pak Victor	Pria	30	S1	Guru Mardi	Daring

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini merupakan guru-guru dari berbagai sekolah dasar (SD) yang memiliki latar belakang berbeda dalam konteks keterlibatan mereka dengan program MBG. Beberapa berasal dari sekolah yang telah secara aktif menerima dan menjalankan program MBG, sedangkan yang lain berasal dari sekolah yang belum menerima bantuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan pandangan, serta memperluas cakupan perspektif mengenai ekspektasi dan realitas program MBG.

Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara terstruktur. Proses pengumpulan data dimulai pada tanggal 9 Juni 2025 hingga 18 Juni 2025. Durasi wawancara berada di rentang 30-45 menit setiap narasumber.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, wawancara dengan tenaga pendidik di beberapa sekolah yang melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mengungkapkan berbagai pandangan dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan program tersebut. Temuan yang diperoleh menunjukkan adanya dukungan terhadap tujuan program, namun juga mengidentifikasi sejumlah masalah dalam implementasinya, seperti kualitas makanan, pengawasan yang kurang, dan tantangan dalam pemilihan vendor. Temuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan harapan tenaga pendidik terhadap keberlanjutan dan efektivitas program MBG di masa mendatang.

Tujuan dan manfaat dari program MBG

Rangkuman jawaban dari narasumber: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan tujuan utama untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Bu Lastri dari SDN Perumnas Condong Catur, tujuan utama program ini adalah untuk membantu anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan mereka. Program ini bertujuan untuk mengurangi masalah gizi buruk dan *stunting* yang semakin menjadi masalah besar di kalangan anak-anak Indonesia. Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Aris dari BPPMPP Seni dan Budaya, dengan gizi yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar, yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan kognitif mereka.

Namun, meskipun banyak yang mendukung tujuan dari program ini, beberapa narasumber, seperti Mas Aji dari SMP Eksperimental Mangunan, juga mencatat bahwa pelaksanaan program MBG sering kali menemui kendala. Salah satu isu utama adalah kualitas makanan yang terkadang tidak memenuhi standar gizi yang seharusnya. Mas Aji menyebutkan bahwa pada awalnya, menu yang disediakan cukup baik, namun seiring berjalannya waktu, porsi makanan yang diberikan tidak cukup memadai, terutama untuk anak-anak yang aktif. Beberapa makanan juga terkadang tidak segar atau tidak sesuai dengan selera anak-anak, yang membuat mereka enggan mengonsumsinya.

Meski begitu, sebagian besar narasumber masih mendukung keberlanjutan program ini dengan beberapa perbaikan, karena manfaat yang diberikan sangat signifikan, khususnya dalam hal pemenuhan gizi bagi anak-anak yang kurang mampu.

Target dari Program MBG

Berdasarkan pendapat Bu Lastri, Pak Aris, dan Mas Aji, program MBG seharusnya lebih difokuskan kepada anak-anak di daerah-daerah dengan kondisi ekonomi rendah atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bu Lastri menekankan bahwa program ini sangat relevan untuk sekolah-sekolah di daerah yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Hal ini sejalan dengan pandangan Pak Aris yang juga berpendapat bahwa anak-anak di daerah 3T lebih membutuhkan bantuan makanan bergizi gratis. Menurut Pak Aris, anak-anak di daerah tersebut sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap gizi yang cukup, sehingga program MBG dapat sangat membantu mereka dalam memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi.

Namun, beberapa narasumber lain, seperti Mas Aji dari SMP Eksperimental Mangunan dan Mbak Tata dari SD Eksperimental, berpendapat bahwa program MBG tidak perlu diberlakukan di semua sekolah. Di sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan atau di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu, program ini dianggap tidak terlalu diperlukan. Mbak Tata, misalnya, berpendapat bahwa program ini lebih tepat diterapkan di daerah-daerah yang memang sulit mendapatkan makanan bergizi, seperti di daerah pelosok atau di panti asuhan, sebagaimana ia dengar dari beberapa koleganya. Mas Aji juga menambahkan bahwa di sekolah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, anak-anak sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup dari rumah atau orang tua mereka, sehingga program ini lebih fokus pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, sebagian besar narasumber sepakat bahwa program MBG sebaiknya lebih selektif dalam memilih target penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan tingkat kebutuhan siswa.

Pihak yang diuntungkan dari Program MBG

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, terutama Bu Lastri dan Mas Aji, pihak yang paling diuntungkan dari program MBG adalah siswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bu Lastri mengungkapkan bahwa dengan adanya program MBG, siswa yang kesulitan membawa bekal atau membeli makanan bergizi kini memiliki akses ke makanan yang dapat mendukung kesehatan dan perkembangannya. Hal ini penting, terutama bagi anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, sehingga mereka dapat memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas.

Namun, vendor atau mitra penyedia makanan juga diuntungkan secara finansial, meskipun ada beberapa kendala terkait pembayaran yang terlambat, seperti yang disampaikan oleh Pak Aris. Vendor mendapatkan keuntungan dari kontrak penyediaan makanan dalam jumlah besar. Meskipun mereka sering menghadapi masalah dalam hal pengelolaan keuangan dan keterlambatan pembayaran, tetap saja mereka memperoleh keuntungan finansial dari partisipasi dalam program ini.

Pemerintah, menurut beberapa narasumber seperti Pak Aris dan Mas Aji, juga diuntungkan karena program ini menjadi simbol keberhasilan kebijakan sosial mereka dalam mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan program ini akan meningkatkan citra pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, terutama dalam hal penanggulangan *stunting* dan gizi buruk di kalangan anak-anak.

Namun, tidak hanya pemerintah dan vendor yang diuntungkan. Orang tua siswa juga merasakan manfaat, terutama yang berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah. Mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli bekal anak, yang bisa meringankan beban ekonomi mereka, seperti yang disampaikan oleh Mas Aji dan Mbak Tata. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan dalam implementasi, banyak pihak yang diuntungkan dari adanya program MBG ini.

Alasan terjadinya kasus keracunan dari program MBG

Menurut narasumber seperti Bu Lastri, Pak Aris, dan Mas Aji, kasus keracunan dalam program MBG sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keteledoran dari pihak vendor, kurangnya pengawasan terhadap kualitas makanan, dan masalah dalam distribusi makanan. Bu Lastri mengungkapkan bahwa keracunan makanan dalam beberapa kasus bisa terjadi karena keteledoran dari pihak vendor dalam hal pengolahan atau

penyimpanan makanan. Hal ini terkait dengan pengelolaan yang kurang baik dari vendor dalam mempersiapkan makanan dalam jumlah besar.

Pak Aris juga menambahkan bahwa pihak sekolah di beberapa tempat sudah berusaha keras untuk melakukan pengawasan, seperti yang mereka lakukan di SD CONCAT, di mana mereka melakukan *quality control* (QC) dengan cara mencicipi sampel makanan sebelum diberikan kepada siswa. Meskipun demikian, masalah ini tetap terjadi, terutama jika vendor tidak menjaga kualitas makanan secara konsisten.

Mas Aji juga menyoroti masalah distribusi makanan yang terlambat, yang mengakibatkan makanan tidak dalam kondisi segar ketika sampai di sekolah.

Keterlambatan ini meningkatkan risiko keracunan karena makanan yang sudah lama disiapkan dan tidak segera disajikan bisa terkontaminasi atau basi. Semua narasumber sepakat bahwa kurangnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari vendor maupun pemerintah, menjadi faktor utama penyebab keracunan makanan dalam program MBG ini.

Pertimbangan penghentian atau program MBG karena kasus keracunan atau diteruskan

Berdasarkan pendapat dari narasumber seperti Bu Lastri, Pak Aris, dan Mas Aji, sebagian besar sepakat bahwa program MBG tidak perlu dihentikan sepenuhnya meskipun ada beberapa kasus keracunan. Bu Lastri menekankan bahwa meskipun kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah perlu menjadi perhatian serius, program ini memiliki tujuan yang sangat baik, yakni membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan makanan bergizi. Oleh karena itu, alih-alih menghentikan program ini, yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaannya.

Pak Aris juga berpendapat serupa, menyatakan bahwa meskipun keracunan bisa terjadi karena faktor kelalaian, program ini tidak boleh dihentikan. Menurutnya, dengan evaluasi yang tepat, program ini masih bisa dilanjutkan dan bahkan diperbaiki, terutama dalam hal kontrol kualitas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap vendor. Mengingat banyaknya manfaat yang diberikan oleh MBG, khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, penting untuk memastikan bahwa masalah keracunan tidak terulang dengan memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi makanan.

Mas Aji, meskipun mencatat bahwa keracunan adalah masalah yang serius, juga berpendapat bahwa program ini perlu dilanjutkan dengan catatan adanya evaluasi menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat lainnya yang menekankan perlunya perbaikan kualitas dan pengawasan yang lebih ketat. Jika pelaksanaan program dapat diperbaiki, maka program MBG akan tetap bermanfaat untuk anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kualitas Menu Dan Pelayanan Dari Penyedia MBG

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, kualitas menu dan pelayanan dari penyedia MBG tampaknya cukup bervariasi, tergantung pada sekolah dan vendor yang terlibat. Bu Lastri dari SDN Perumnas Condongcatur mengatakan

bahwa awalnya, menu yang disediakan cukup baik, dengan porsi yang memadai dan nutrisi yang cukup. Namun, ia mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, porsi makanan menjadi lebih kecil dan tidak selalu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama untuk mereka yang sangat aktif. Menurutnya, menu dengan anggaran 10 ribu per anak memang tidak selalu mencukupi, dan hal ini bisa mengurangi efektivitas program MBG.

Pak Aris dari SD CONCAT juga memberikan pandangan serupa, mengatakan bahwa kualitas menu yang disediakan pada awalnya baik, tetapi semakin banyak sekolah yang terlibat dalam program ini, pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi lebih sulit. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ada kontrol kualitas (QC) yang dilakukan oleh pihak sekolah, kualitas makanan masih sering terpengaruh oleh faktor-faktor lain, seperti keterlambatan pengiriman dan kondisi bahan makanan yang kurang segar. Meskipun ada upaya untuk memastikan makanan yang disediakan layak konsumsi, pengiriman makanan yang terlambat dan proses masak yang tidak optimal menyebabkan beberapa masalah kualitas.

Mas Aji dari SMP Eksperimental Mangunan juga menyatakan bahwa kualitas makanan yang diberikan pada awalnya baik, namun kemudian mulai menurun seiring bertambahnya jumlah sekolah yang menerima program MBG. Pengawasan yang lebih ketat dibutuhkan untuk memastikan makanan yang disediakan tetap memenuhi standar gizi yang diharapkan. Meskipun pihak sekolah sudah menerapkan prosedur untuk mengganti makanan yang tidak layak, seperti mengganti makanan yang basi atau tidak segar, masih ada keluhan dari siswa terkait kualitas makanan yang tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

Alternatif Program

Sebagian besar narasumber, seperti Pak Aris, Bu Lastri, dan Mas Aji, sepakat bahwa jika ada pilihan antara melanjutkan program MBG atau menggantinya dengan program lain seperti pendidikan gratis atau fasilitasi sekolah, mereka lebih memilih untuk mengganti program MBG dengan fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan. Mereka beralasan bahwa meskipun MBG memberikan manfaat dalam hal pemenuhan gizi, masalah yang dihadapi dalam implementasi program ini sering kali menghambat efektivitasnya.

Mas Aji mengungkapkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan yang baik, program ini lebih relevan jika difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti di daerah terpencil atau kurang berkembang. Jika pemerintah

ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka investasi dalam fasilitas sekolah dan pemerataan pendidikan menjadi lebih penting. Dalam pandangannya, fasilitas yang baik dan akses pendidikan yang merata akan memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Bu Lastri juga menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan sebagai prioritas utama. Dia merasa bahwa fasilitas sekolah yang lebih baik, terutama di daerah terpencil, akan lebih memberikan dampak positif jangka panjang. Program pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah akan lebih menyentuh kebutuhan dasar anak-anak, seperti infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.

Pak Aris lebih memilih program pemerataan pendidikan karena menurutnya pendidikan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa MBG tetap memiliki tempatnya, namun evaluasi dan perbaikan lebih lanjut sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada manfaat dari program MBG, banyak narasumber yang merasa bahwa fokus pada pendidikan gratis dan fasilitasi sekolah akan lebih efektif dalam jangka panjang, karena itu akan langsung mempengaruhi kualitas pendidikan dan peluang bagi anak-anak di Indonesia.

Pembahasan

Penelitian ini, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengungkapkan bahwa meskipun tujuan program ini sangat baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi siswa, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam perspektif sosiologi politik, temuan ini sejalan dengan teori-teori yang menjelaskan tentang distribusi kekuasaan dan konflik sosial yang dapat muncul dalam suatu masyarakat.

Menurut teori sosiologi politik, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber dan Karl Marx di dalam Rush, M., & Althoff, P. (1997), distribusi kekuasaan sering kali tidak merata dalam masyarakat, dan hal ini bisa menciptakan ketegangan, baik itu antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan yang lebih lemah, maupun antara penguasa dan yang dikuasai. Dalam hal program MBG, kelompok yang paling diuntungkan adalah siswa dari keluarga kurang mampu, yang sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup. Namun, seiring berjalannya program, muncul ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan antara pemerintah sebagai pengelola kebijakan, vendor yang menyediakan makanan, dan sekolah yang bertanggung jawab atas distribusinya. Ketidakseimbangan ini

menyebabkan masalah kualitas makanan yang tidak selalu terjaga, seperti yang tercatat dalam beberapa kasus keracunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari pemerintah, implementasi program ini menghadapi ketegangan yang dipicu oleh perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi kekuasaan tersebut.

Dalam teori Konflik Struktural, seperti yang diajukan oleh Ralf Dahrendorf dan Gaetano Mosca, masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda, dan konflik akan muncul saat kepentingan-kepentingan ini bertabrakan. Dalam hal ini, perbedaan kepentingan antara pemerintah (sebagai penguasa) dan vendor yang merasa dirugikan oleh proses pembayaran yang lambat, serta perbedaan antara pihak sekolah dan siswa, menunjukkan adanya potensi konflik. Program MBG menjadi arena bagi kelompok-kelompok ini untuk berjuang mempertahankan kepentingan mereka masing-masing, meskipun dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa.

Lebih lanjut, menurut pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni, program MBG dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan dominasi yang tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan melalui persuasi dan pengaruh ideologis yang dibangun oleh pemerintah. Gramsci menyatakan bahwa hegemonisasi budaya dan ideologi terjadi ketika kelompok dominan berhasil membuat ide mereka diterima oleh kelompok yang lebih lemah tanpa adanya paksaan.

Di dalam konteks ini, pemerintah dengan ideologi dan kebijakan MBG mencoba untuk mengubah persepsi publik dan mempengaruhi pola makan masyarakat, terutama anak-anak di sekolah. Namun, seperti yang terungkap dalam temuan lapangan, keberhasilan hegemoni ini sangat bergantung pada seberapa efektifnya program ini dijalankan di lapangan. Jika kualitas makanan yang disediakan tidak sesuai dengan harapan, maka pengaruh ideologi pemerintah akan berkurang, dan masyarakat akan mempertanyakan legitimasi dari program tersebut.

Konsep sosiologi politik lainnya yang relevan adalah analisis partisipasi politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dalam hal ini, keberhasilan MBG sangat bergantung pada tingkat partisipasi berbagai pihak, baik itu guru, orang tua, maupun masyarakat dalam mengawasi dan memastikan keberlanjutan serta kualitas program ini. Seperti yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik dapat bersifat sukarela atau terpaksa. Dalam konteks MBG, partisipasi sukarela dari berbagai pihak sangat

diperlukan untuk meningkatkan kualitas program ini. Jika partisipasi tersebut kurang, maka program ini mungkin akan gagal dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi siswa.

Selain itu, komunikasi politik juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program MBG. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya. Dalam hal ini, pengelolaan komunikasi yang efektif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai kualitas makanan dan manfaat MBG dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika informasi mengenai penyediaan makanan tidak disosialisasikan dengan jelas, maka program ini akan kehilangan dukungan masyarakat, dan efek positif yang diharapkan dari program ini tidak akan tercapai.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh teori-teori dalam sosiologi politik, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Program ini membutuhkan evaluasi dan perbaikan yang lebih mendalam, terutama dalam hal distribusi kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunikasi politik untuk memastikan keberlanjutannya. Mengingat masalah yang dihadapi, seperti kualitas makanan yang kurang terjaga, partisipasi aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tujuan program ini dapat tercapai dengan maksimal.

PENUTUP

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara konseptual memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sekaligus mendukung perkembangan kognitif dan kualitas pendidikan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, seperti inkonsistensi kualitas menu, lemahnya pengawasan vendor, risiko keracunan akibat distribusi tidak optimal, serta sasaran program di daerah yang sebenarnya tidak memerlukan bantuan ini. Meski demikian, program ini tidak seharusnya dihentikan karena manfaatnya yang vital bagi kelompok rentan, melainkan perlu dievaluasi secara mendalam dengan memperbaiki seleksi penerima, pengawasan ketat terhadap vendor, dan sistem distribusi.

Dari perspektif sosiologi politik, dinamika program MBG mencerminkan ketegangan dalam distribusi kekuasaan antara pemerintah, vendor, sekolah, dan

masyarakat. Ketidakseimbangan ini memicu konflik kepentingan, seperti prioritas profit vendor versus kualitas makanan, yang menggerus efektivitas program. Hegemoni pemerintah melalui kebijakan ini juga rentan gagal jika tidak didukung implementasi yang kredibel. Untuk keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan komunikasi politik yang transparan menjadi kunci guna memastikan program tetap relevan, terlegitimasi, dan mampu memitigasi risiko seperti keracunan.

Ke depan, meski MBG diakui penting, sebagian pemangku kepentingan lebih memprioritaskan alternatif seperti pemerataan fasilitas pendidikan atau sekolah gratis. Alasannya, investasi dalam infrastruktur pendidikan dinilai memberi dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan menyasar akar masalah kualitas hidup anak Indonesia. Dengan demikian, MBG perlu dioptimalkan secara selektif (khusus daerah berisiko gizi), sambil mengintegrasikannya dalam kebijakan pendidikan holistik yang memastikan gizi dan akses belajar berkualitas berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Foucault, Michel. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977** (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Gramsci, A. (2013). *Catatan-catatan dari penjara* (Penerjemah Tim Tebaran). Tebaran.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang* (S. Simamora, Penerj.). Rineka Cipta.
- Mosca, G. (1939). *The ruling class* (H. D. Kahn, Penerj.). McGraw-Hill.
- Rush, Michael & Althoff, Philip. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*.

